

(RLPPD)
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM

2025

Jalan Trans Papua
Arso – Kabupaten Keerom, Kode Pos 99368

RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2024

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif dan Sumber data dan Informasi Dokumen LPPD berasal dari Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, dan Distrik) yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Capaian Kinerja yang dimaksudkan adalah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari **Pertama**, Capaian kinerja makro. Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan. **Kedua** adalah Capaian kinerja penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berikut ini adalah uraian atas capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Keerom pada Tahun Anggaran 2024.

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

TABEL 1.
CAPAIAN KINERJA MAKRO

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	LAJU KINERJA (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,25	69,81	0,90
2	Angka Kemiskinan	15,68 %	15,84%	1,2
3	Angka Pengangguran	1,50 %	2,91 %	94
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,04	3,20	56,86
5	Pendapatan Per-Kapita	53.337.460	56.366.960	5,68
6	Ketimpangan Pendapatan	0.381	0,414	8,67

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi

dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah itu terdiri atas urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/infomasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar menggambarkan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial diukur berdasarkan capaian dari Indikator Kinerja Kunci. Kinerja Urusan Pelayanan Dasar menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib terkait pelayanan dasar. Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar berdasarkan sumberdaya yang ada dan dimiliki oleh Daerah guna terselenggaranya pelayanan masyarakat. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Atas penjelasan tersebut maka berikut ini diuraikan beberapa capaian kinerja urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar Kabupaten Keerom pada tahun 2024.

2.1. Urusan Pendidikan

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Keerom pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	IKK Outcome	Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian Tahun 2024 (%)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	48,69	39,10
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	73,13	67,86
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	62,16	77,09
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,16	100

b. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Keerom Tahun 2024 sebesar Rp.36.328.876.200,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Pendidikan
2) Program Pengembangan Kurikulum
3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Keerom Tahun 2024 antara lain jangkauan akses pelayanan tenaga kependidikan dan pendidik serta biaya penyelenggaraan pendidikan, kurang optimalnya sarana/prasarana pendidikan yang berkualitas

2.2. Urusan Kesehatan

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Keerom pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	IKK Outcome	Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian Tahun 2024 (%)
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,305	1,15
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	48,97	44,46
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	63,46	53,57
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	74,43	63,27
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	66,38	45,19
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62,47	67,23
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	57,77	50,58
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	51,55	57,87
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25,60	30,34
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan	39,32	36,09

No	IKK Outcome	Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian Tahun 2024 (%)
	pelayanan kesehatan sesuai standar		
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	40,98	64,75
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	68,05	31,76
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	26,46	75,23

b. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten Keerom Tahun 2024 sebesar Rp.66.047.395.557,00,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2) Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
3) Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Keerom Tahun 2024 antara lain sebagai berikut pelayanan kesehatan yang belum merata, derajat kesehatan masyarakat belum optimal, penanganan penyakit menular yang belum optimal, jangkauan serta biaya pelayanan kesehatan.

2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kabupaten Keerom pada tahun 2024

berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	IKK Outcome	Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian Tahun 2024 (%)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	11,926	100
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Tidak memiliki kawasan pantai	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	(Tidak terdapat irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dan dipelihara Tahun 2023)	7,27
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	29,86	60,17
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0 (Tidak diprogramkan)	0 (Tidak diprogramkan)
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	40,64	29,30
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis	0 (Tidak dilaksanakan	27,5

No	IKK Outcome	Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian Tahun 2024 (%)
	yang memiliki sertifikat kompetensi	karena belum ada Perangkat Sub Urusan Konstruksi)	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100

b. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Keerom Tahun 2024 sebesar Rp.100.350.738.845,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumberdaya air
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum
3) Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
4) Program Penataan Bangunan Gedung
5) Program penyelenggaraan jalan

Namun yang dapat direalisasikan dalam Anggaran tahun 2024 hanya program Penyelenggaraan jalan saja.

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Keerom Tahun 2024 adalah sebagai berikut : geografis yang ada di Kabupaten Keerom memerlukan upaya dan pembangunan yang diprioritaskan guna mendukung pelayanan dasar dan konektifitas antar kampung.

2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Keerom pada tahun

2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	IKK Outcome	Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian Tahun 2024 (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	91,66	0
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 Tidak terdapat relokasi dari Program Pemerintah	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0 Tidak Ada kawasan kumuh	0
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0 Keterbatasan anggaran Tahun 2023	0
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0 (Belum ada)	0

b. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Keerom Tahun 2024 sebesar Rp.8.484.444.929 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Perumahan dengan Indikator Kinerja program ketersediaan rumah layak huni
2) Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Keerom Tahun 2024 adalah sebagai berikut : banyak perumahan yang belum memuhi kriteria layak huni namun masih keterbatasan anggaran.

2.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Keerom pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	IKK Outcome	Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian Tahun 2024 (%)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	66,66	37,5
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	14 %	1,85
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	0,30
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	82,22	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tidak Terjadi kebakaran Tahun 2023	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Tidak Terjadi kebakaran Tahun 2023	41

b. Realisasi Belanja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Keerom Tahun 2024 sebesar Rp.1.393.776.831,00 dengan program/kegiatan unggulan Program peningkatan ketentramaan dan ketertiban umum dan Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Untuk bidang Kebencanaan Program Penanggulangan Bencana melalui kampung tanggap bencana.

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Keerom Tahun 2024 adalah sebagai berikut penanganan ketentraman dan ketertiban umum terbatas karena luasnya jangakauan geografis sementara dukungan Sumberdaya belum optimal.

2.6. Urusan Sosial

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Keerom pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	IKK Outcome	Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian Tahun 2024 (%)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	12,45	17,79

No	IKK Outcome	Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian Tahun 2024 (%)
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	0 Tidak terlaksana Karena Minim Anggaran	100

b. Realisasi Belanja urusan Sosial

Realisasi belanja urusan Sosial di Kabupaten Keerom Tahun 2024 sebesar Rp.5.867.487.646 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : Program Perlindungan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan sosial, Program rehabilitasi sosial dan Program Penanganan bencana

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten Keerom Tahun 2024 adalah sebagai berikut : keterbatasan alokasi anggaran pada bidang sosial, jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang bertambah.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provini dan Kabupaten/ Kota Tahun 2022, maka Kabupaten Keerom berhasil mendapatkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(EPPD) dengan Skor kinerja 1,9184 dan status kinerja Rendah.

3.2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom berdasarkan Laporan Nomor 09.B/LHP/XIX.JYP/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 maka atas Laporan Keuangan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Keerom berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini WTP ini pencapaian WTP yang keenam kalinya diperoleh.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kabupaten Keerom Tahun 2024 sebesar Rp.956.001.180.660,96 dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2024 mencapai Rp.918.493.982.316,49.

Secara rinci, rincian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. Laporan Realisasi Anggaran APBD 2024

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN**	**5.1.1**	**992.803.221.597,64**	**956.001.180.660,96**	**96,29**	**984.425.081.094,54**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.1.1.1**	**17.720.430.156,64**	**13.940.565.929,96**	**78,67**	**12.115.611.779,54**
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	9.924.592.906,00	6.514.398.783,00	65,64	4.965.078.102,28
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	1.297.846.108,64	1.106.514.032,00	85,26	1.101.222.665,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.706.411.103,00	2.706.411.103,00	100,00	2.257.730.973,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	3.791.580.039,00	3.613.242.011,96	95,30	3.791.580.039,26
7	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.2**	**959.433.027.803,00**	**927.484.509.831,00**	**96,67**	**934.576.888.063,00**
8	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**5.1.1.2.1**	**940.547.183.000,00**	**909.495.425.952,00**	**96,70**	**917.167.154.683,00**
9	Dana Perimbangan		750.841.824.000,00	719.790.066.952,00	95,86	702.678.342.683,00
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		28.076.258.000,00	22.979.882.197,00	81,85	57.382.798.503,00
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		547.690.760.000,00	535.017.742.540,00	97,69	514.482.387.000,00
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		99.052.334.000,00	97.480.604.765,00	98,41	68.991.342.965,00
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		76.022.472.000,00	64.311.837.450,00	84,60	61.821.814.215,00
14	Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	19.126.594.000,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6	7
15	Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		93.474.483.000,00	93.474.483.000,00	100,00	114.802.120.000,00
16	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua		80.794.044.000,00	80.794.044.000,00	100,00	104.212.721.000,00
17	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		12.680.439.000,00	12.680.439.000,00	100,00	10.589.399.000,00
18	Dana Desa		81.939.267.000,00	81.939.267.000,00	100,00	80.560.098.000,00
19	Insentif Fiskal		14.291.609.000,00	14.291.609.000,00		
20	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**5.1.1.2.2**	**18.885.844.803,00**	**17.989.083.879,00**	**95,25**	**17.409.733.380,00**
21	Pendapatan Bagi Hasil		18.885.844.803,00	17.989.083.879,00	95,25	15.409.733.380,00
22	Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.1.1.3**	**15.649.763.638,00**	**14.576.104.900,00**	**93,14**	**37.732.581.252,00**
24	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	23.106.281.399,00
25	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	15.649.763.638,00	14.576.104.900,00	93,14	14.626.299.853,00
26	**BELANJA DAN TRANSFER**	**5.1.2**	**1.000.955.246.132,00**	**918.493.982.316,49**	**91,76**	**984.956.739.647,78**
27	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**	**665.749.123.736,91**	**614.182.000.077,49**	**92,25**	**677.534.536.809,78**
28	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	324.108.476.637,01	319.965.407.314,00	98,72	281.234.068.729,00
29	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	206.461.948.086,90	170.676.390.334,49	82,67	274.896.754.994,78
30	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	267.578.736,00
31	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	116.702.022.013,00	107.414.450.448,00	92,04	95.873.614.500,00
32	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	18.476.677.000,00	16.125.751.981,00	87,28	25.262.519.850,00
33	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**	**187.334.758.431,61**	**163.001.385.980,00**	**87,01**	**162.777.138.538,00**
34	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	**0,00**	3.471.900.000,00
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	24.055.415.612,00	21.276.234.106,00	88,45	30.310.860.130,00
36	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	62.257.749.304,25	50.848.915.441,00	81,67	40.722.581.798,00
37	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	98.095.052.849,36	89.681.363.313,00	91,42	86.176.518.108,00
38	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	10.813.894,00	3.153.238,00	29,16	344.500.000,00
39	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	2.915.726.772,00	1.191.719.882,00	40,87	1.750.778.502,00
40	**BELANJA TAK TERDUGA**	**5.1.2.3**	**12.000.000.000,00**	**11.951.893.000,00**	**99,60**	**28.749.402.000,00**
41	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	12.000.000.000,00	11.951.893.000,00	99,60	28.749.402.000,00
42	**TRANSFER**	**5.1.2.4**	**135.871.363.963,48**	**129.358.703.259,00**	**95,21**	**115.895.662.300,00**
43	Transfer Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	135.871.363.963,48	129.358.703.259,00	95,21	115.895.662.300,00
44	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		1.581.895.283,00	1.581.895.283,00		0,00
45	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		134.289.468.680,48	127.776.807.976,00	95,15	115.895.662.300,00
46	**SURPLUS / (DEFISIT)**		**(8.152.024.534,36)**	**37.507.198.344,47**	**460,10**	**(531.658.553,24)**
47	**PEMBIAYAAN**	**5.1.3**				
48	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.3.1**	**8.152.024.534,36**	**8.152.014.534,87**	**100,00**	**16.182.785.823,60**
49	Penggunaan SiLPA	5.1.3.1.1	8.152.024.534,36	8.152.014.534,87	**100,00**	16.182.785.823,60
50	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.3.2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.499.102.736,00**
51	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	7.499.102.736,00
53	**PEMBIAYAAN NETTO**		**8.152.024.534,36**	**8.152.014.534,87**	**100,00**	**8.683.683.087,60**
54	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	**5.1.4**	**0,00**	**45.659.212.879,34**	**0,00**	**8.152.024.534,36**

5. INOVASI DAERAH

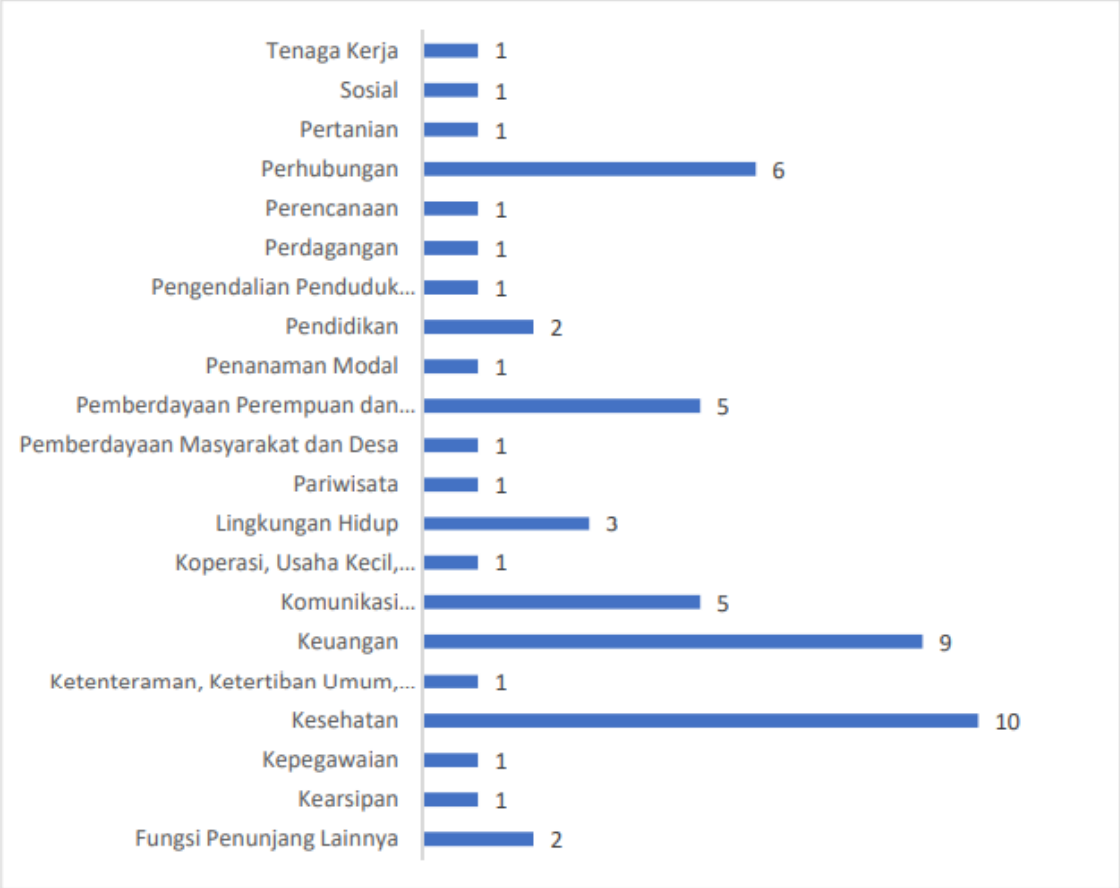
Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan bentuknya, inovasi daeah Kabupaten Keerom didominasi oleh Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, ditunjukkan oleh angka persentase yang mencapai 81.63%. Inovasi berikutnya sebanyak 16.33% berupa inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun bentuk inovasi pelayanan publik masih belum banyak, yaitu hanya sebesar 2.04%.

Inovasi daerah di Kabupaten Keerom apabila dilihat berdasarkan jenis inovasinya terbagi menjadi dua, yaitu Inovasi Digital dan Inovasi NonDigital. Persentase inovasi jenis NonDigital mendominasi dibandingkan dengan inovasi digital di Kabupaten Keerom. Sebanyak 63.27% inovasi daerah nondigital, sedangkan inovasi daerah digital sebanyak 36.73%.

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Keerom pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu mencapai 95.92% inovasi. Selanjutnya inovasi daerah di Kabupaten Keerom juga diinisiasi oleh Kepala Daerah dan Masyarakat dengan persentase sama yaitu sebesar 2.04% inovasi.

Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Keerom berdasarkan urusan pemerintahan ditampilkan pada grafik diatas. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa Inovasi daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaporan oleh Kabupaten Keerom didominasi oleh urusan pemerintahan Kesehatan, dan Keuangan yaitu secara berturut-turut sebanyak 10 dan 9 (sembilan) inovasi daerah. Selanjutnya urusan Perhubungan dengan sejumlah 6 (enam) inovasi. Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dan Komunikasi dan Informatika samasama memiliki 5

(lima) inovasi daerah. Berikutnya urusan dengan jumlah inovasi sebanyak 2 (dua) adalah Urusan Pendidikan dan urusan Fungsi Penunjang lainnya. Adapun inovasi daerah lainnya tersebar di berbagai urusan, yaitu Tenaga Kerja, Sosial, Pertanian, Perencanaan, Perdagangan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian, dan Kearsipan dengan jumlah inovasi sebanyak 1 (satu) di setiap urusan.

Berikut daftar inovasi pelayanan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Keerom Tahun 2024

No	Nama	Instansi	Bentuk Inovasi	Tahun	Deskripsi
1	IPAL KEN MU GWOGER KEEROM	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Inovasi tata kelola pemerintahan	2022	Pembangunan sanitasi guna terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman
2	Rumah Khusus ASN	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	2022	Pembangunan rumah yang berorientasi kepada terpenuhinya Kebutuhan Papan bagi ASN Kabupaten Keerom
3	Mobile TBC	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	2022	Deteksi dini dan upaya pengobatan TBC di daerah pedalaman dan perbatasan di Kabupaten Keerom
4	Calling Keerom	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	pelayanan publik	2022	Pemenuhan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah sulit akses dan

No	Nama	Instansi	Bentuk Inovasi	Tahun	Deskripsi
					jangkauan
5	Macepukeerom (Malaria Center Kabupaten Keerom)	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	2022	Deteksi dini dan upaya pengobatan malaria di daerah pedalaman dan perbatasan di Kabupaten Keerom

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024 yang disusun dan disampaikan sebagai tindaklanjut dari kewajiban Kepala Daerah yang diamanatkan didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan dan pembinaan pemerintahan daerah.

KWEMBO KENTKEI, GIRGURA KENSUWRI

(TUHAN MENCIPTAKAN, KITA YANG MEMBANGUN)

Keerom, 27 Maret 2025

BUPATI KEEROM

PITER GUSBAGER, S.Hut, MUP